

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Elektronik Tilang merupakan sebuah kebijakan baru yang pertama kali diterapkan di DKI Jakarta. Elektronik Tilang pertama kali dilakukan uji coba pada tahun 2018 di kawasan Sudirman – Thamrin. Kebijakan ini nantinya akan mencatat para pelanggar secara elektronik dengan menggunakan kamera *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR). Sehingga, secara otomotasi CCTV tersebut akan merekam dan menyimpan bukti pelanggaran yang nantinya akan digunakan sebagai barang bukti saat akan ditindak. Bentuk pelanggarannya bisa berupa pelanggaran ganjil-genap, pelanggaran marka dan rambu jalan, pelanggaran batas kecepatan, kesalahan jalur, menerobos lampu merah, melawan arus, mengemudi dengan kecepatan melebihi batas, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, serta menggunakan gawai saat berkendara.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”¹ Pada program Elektronik Tilang, ketika terjadi pelanggaran lalu lintas maka yang

¹ UU No. 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*

bersangkutan akan dikirimkan surat ke alamat publik untuk mengkonfirmasi pelanggarannya tersebut.

Nantinya, pelanggar akan melakukan konfirmasi melalui web E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) Polda Metro Jaya ataupun bisa datang langsung ke kantor Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya. Selanjutnya, yang bersangkutan akan diterbitkan Tilang Biru sebagai bukti pelanggaran dan membayar denda tilang dengan *Virtual Account*. Kebijakan yang baru ini juga mempermudah dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas.²

Penerapan kebijakan baru ini, tentu saja dilatar belakangi oleh para pelanggar lalu lintas yang terus meningkat. Sehingga, para pelanggar melakukan penyuaian terhadap beberapa aparat lalu lintas. Tentu saja, ini membuat para pelanggar tidak merasa jera terhadap kesalahannya. Maka, perlu adanya kebijakan baru dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Dengan adanya program E-Tilang bisa membantu pemerintah dalam mewujudkan program *Elektronic Governance* di DKI Jakarta. Menurut Mustopadidjaja (2003), *E-Governance*, juga dapat dipahami sebagai penggunaan teknologi berdasarkan *WEB* (jaringan), komunikasi internet, dan dalam kasus tertentu merupakan aplikasi interkoneksi untuk memfasilitasi komunikasi dan memperluas akses ke dan atau dari pemberian layanan dan informasi pemerintah kepada penduduk, dunia usaha, pencari kerja, dan pemerintah lain, baik instansional maupun antar negara.³

² Website Jakarta Smart City, Jakarta 2019 pada smartcity.jakarta.go.id . Diakses pada 28 September 2022 Pukul 23.00 WIB.

³ Achmad Habibullah pada tahun (2010) dalam bentuk jurnal dengan judul "*Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government*". Diakses pada 4 Oktober 2022 Pukul 12.32 WIB.

Pelayanan publik yang diselenggarakan pun bisa lebih optimal. Karena sudah menggunakan bantuan teknologi yang membuat segala aktivitasnya lebih mudah. Sebelum menggunakan Elektronik Tilang atau E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*), banyak sekali terjadi pelanggaran lalu lintas yang disebabkan karena penyupaan dan pelanggaran yang dilakukan oleh para pelanggar lalu lintas terhadap aparat penegak hukum atau polisi lalu lintas.

Kondisi tersebut yang membuat para pelanggar atau masyarakat merasa tidak jera terhadap hukuman yang sudah dibuat. Sehingga, penerapan kebijakan Elektronik Tilang ini bisa menjadi inovasi baru dalam penyelenggaraan patuh lalu lintas. Pada wilayah Jakarta Timur merupakan lokasi yang memiliki penduduk dengan jumlah yang sangat banyak pada tahun 2021 sebesar 3,056,30⁴ dibandingkan dengan wilayah Jakarta lainnya.

Kondisi tersebut berpotensi sangat besar terjadi pelanggaran lalu lintas pada wilayah tersebut. Secara administrasi, Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kotamadya dan 1 Kabupaten Administrasi yaitu Jakarta Pusat dengan luas daratan 47,90 km²; Jakarta Utara dengan luas daratan 154,01 km², Jakarta Barat dengan luas daratan 126,15 km²; Jakarta Selatan dengan luas daratan 145,73 km²; Jakarta Timur dengan luas daratan 187,73 km² dan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.⁵

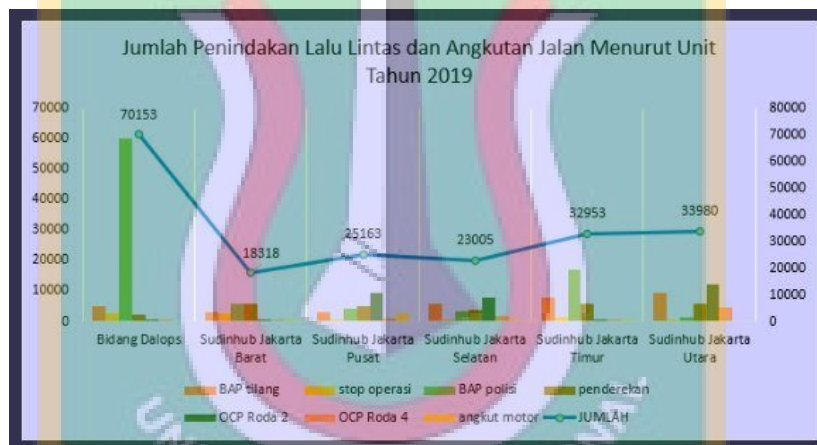
Jika dilihat dari kedua informasi tersebut, Jakarta Timur memiliki wilayah yang sangat luas dibandingkan dengan wilayah Jakarta lainnya sehingga jumlah

⁴ Website Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Jakarta 2021 pada jakarta.bps.go.id . Diakses pada 30 September 2022 Pukul 16.30 WIB.

⁵ *Ibid*

penduduknya pun akan lebih banyak dibandingkan dengan wilayah Jakarta lainnya. Dengan terbentuknya kondisi tersebut maka wilayah Jakarta Timur berpotensi sangat besar terjadinya pelanggaran lalu lintas yang tinggi. Hal tersebut bisa dibuktikan bahwa pada tahun 2019, Jakarta Timur berada pada posisi tinggi ke dua dalam kasus pelanggaran lalu lintas.

Gambar 1.1
Data Jumlah Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menurut Unit
Tahun 2019



Sumber : Website Portal Statistik Sektorl Provinsi DKI Jakarta (2022)

Menurut data dari portal Statistik Sektorl Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2019 jumlah penindakan pelanggaran lalu lintas tertinggi nomor 2 adalah Jakarta Timur sebanyak 32.953⁶. Jika hal ini tidak segera dilakukan tindakan maka nantinya angka pelanggar lalu lintas di DKI Jakarta khususnya pada wilayah Jakarta Timur akan terus meningkat. Tentunya, ini menjadi permasalahan baru bagi pemerintah dalam mengatasi meningkatnya penindakan pelanggaran lalu lintas tersebut.

⁶ *Ibid*

Tabel 1.1

Jumlah Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas, Korban, dan Kerugiannya di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

Jumlah Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas, Korban dan Kerugiannya di Provinsi DKI Jakarta, 2020							
<i>Number of Traffic Accidents, Victims and Its Lost in DKI Jakarta Province, 2020</i>							
Sub Satuan Kerja <i>Kerja Police</i>	Korban/Victim				Kerugian/Losses		Jumlah Kejadian Accident
	Mati Dead	Luka Berat Seriously Injured	Luka Ringan Slightly Injured	Jumlah Total	Benda Materials	Uang Money (000 Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Subdit Bin Gakkum	36	77	493	606	933	4 630 350 000	596
Satlantas Will Jakarta Pusat	10	22	593	625	676	617 900 000	560
Satlantas Will Jakarta Utara	130	7	735	872	-	1 018 400 000	716
Satlantas Will Jakarta Barat	57	172	554	783	816	899 800 000	693
Satlantas Will Jakarta Selatan	56	89	673	818	903	1 606 350 000	708
Satlantas Will Jakarta Timur	65	116	1423	1604	1713	2 307 350 000	1456
Satlantas Will Kepulauan Seribu	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah/Total	354	483	4471	5308	5985	11 080 150 000	4.729

Sumber/Source: Ditlantas Polda Metro Jaya/Traffic Directorate of DKI Jakarta

Sumber : Website Portal Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2022)

Menurut data dari portal Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, pada tahun 2020 DKI Jakarta berada pada peringkat pertama dengan jumlah kecelakaan sebanyak 1456 dan kerugian secara materiil sebesar 2.307.350.000⁷. Data tersebut membuktikan bahwa tidak menutup kemungkinan wilayah Jakarta Timur berada pada posisi pertama dengan jumlah kejadian kecelakaan terbanyak pada tahun 2020. Maka, urgensi pada penelitian ini yaitu untuk mengurangi jumlah kerugian secara materiil yang disebabkan karena kecelakaan lalu lintas. Jika dibiarkan maka wilayah Jakarta Timur akan terus mengalami peningkatan jumlah penindakan pelanggaran lalu lintas.

⁷ Website Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Jakarta 2020 pada jakarta.bps.go.id . Diakses pada 30 September 2022 Pukul 17.26 WIB.

Maka, nantinya anggaran dana yang akan dikeluarkan pun juga ikut meningkat. Disini pemerintah perlu dengan tegas mencari apa yang menjadi penyebab utama bagi para pelanggar lalu lintas berani melakukan pelanggaran. Selain itu, pemerintah juga bisa membuat sanksi yang lebih jera lagi dan tentunya lebih optimal daripada sebelumnya.

Tabel 1.2
Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Jenis Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2021

Sub Satuan Kerja	Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Jenis Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta														Jumlah
	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
Subdit Bin Gakkum	-	51	-	-	8	2	-	61	-	297	3	-	587	24	1033
Satlantas Wil Jakarta Pusat	-	1	-	5	2	-	3	13	2	63	10	-	491	7	597
Satlantas Wil Jakarta Utara	-	2	1	7	3	2	-	146	22	82	6	12	537	10	830
Satlantas Wil Jakarta Barat	-	5	-	8	-	-	3	51	1	62	24	-	676	11	841
Satlantas Wil Jakarta Selatan	-	2	-	6	4	-	1	39	16	78	14	20	719	14	913
Satlantas Wil Jakarta Timur	-	2	-	20	-	-	-	134	-	159	71	14	1497	30	1927
Satlantas Wil Kepulauan Seribu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	63	1	46	17	4	7	444	41	741	128	46	4507	96	6141

Sumber/Source: Ditlantas Polda Metro Jaya/Traffic Directorate of DKI Jakarta
 Source Url: <https://jakarta.bps.go.id/indicator/34/593/1/jumlah-korban-kecelakaan-lalu-lintas-menurut-jenis-kendaraan-bermotor-di-provinsi-dki-jakarta.html>
 Access Time: September 28, 2022, 1:46 pm

Sumber : Website Portal Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2022)

Menurut data dari portal Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2021, tingkat korban kecelakaan lalu lintas di Jakarta Timur meningkat sebanyak 1927 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 1.927⁸. Rata-rata transportasi yang mengalami kecelakaan yaitu kendaraan bermotor. Pemerintah perlu untuk melakukan sosialisasi dan melakukan pengecekan yang selektif terhadap aparat yang akan memberikan surat izin mengemudi khususnya pada kendaraan bermotor.

⁸ Website Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Jakarta 2020/1 pada jakarta.bps.go.id . Diakses pada 30 September 2022 Pukul 19.30 WIB.

Karena pelanggaran lalu lintas diawali dengan para pengendara yang tidak menaati peraturan dan pada umumnya banyak juga yang melakukan kecurangan untuk mendapatkan surat izin mengemudi. Tentunya, ini juga bisa menjadi solusi dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas yang disebabkan karena para pengendara yang tidak memahami peraturan lalu lintas. Dari ke empat data diatas menjelaskan bahwa para pelanggar lalu lintas khususnya di wilayah Jakarta Timur mengalami peningkatan yang statis tiap tahunnya.

Tentunya hal tersebut merupakan permasalahan baru bagi pemerintah agar bisa membenahi hukuman atau sanksi ataupun fasilitas yang berfungsi sebagai penunjang untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah bisa menambahkan fasilitas seperti CCTV diberbagai jalan yang ramai pada wilayah Jakarta Timur. Sehingga, pemberian sanksi pun lebih akurat dan tidak terjadi kecurangan pada saat akan ditindak.

Menurut Morrisey, strategi adalah proses untuk menentukan arah yang harus dituju oleh perusahaan. Sehingga, nantinya bisa mencapai tujuan tersebut dan sebagai pendorong perusahaan dalam memilih produk, jasa, dan pasar dimasa depan.⁹ Dengan begitu, strategi E-Tilang bisa mencapai tujuan atau mengatasi permasalahan lalu lintas yang dihadapi.

⁹ M. Manullang “*Manajemen Strategi*”, (Medan: Perdana Publishing, 2016), hlm. 14-25.

Tabel 1.3

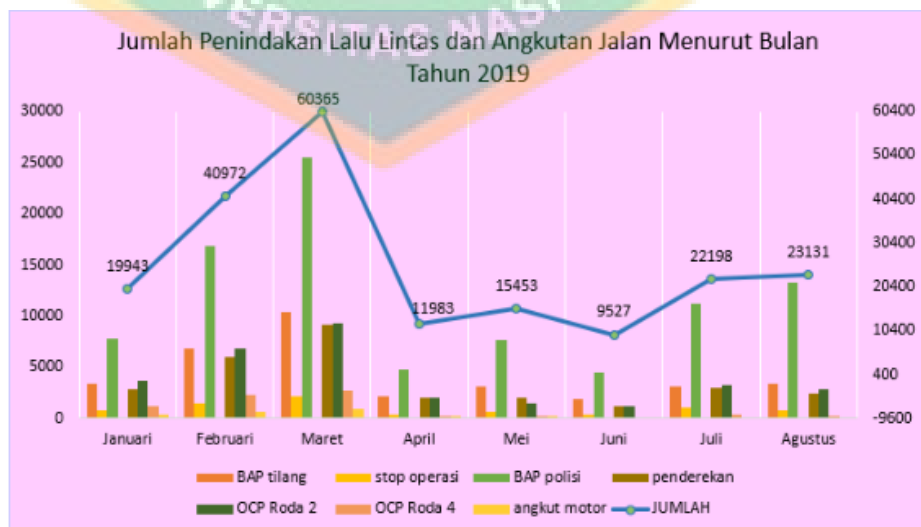
Data Penindakan Pelanggaran & Laka Lintas Selama Tahun 2015-2018 PMJ

No	Uraian	Tahun				Trend		
		2015	2016	2017	2018	2015/2016	2016-2017	2017-2018
1	Penindakan Gar (Tilang)	1.037.828	1.306.060	1.062.900	1.144.752	20,5%	-22,9%	7,2%
2	Jumlah Kecelakaan Lalu lintas	6.434	6.180	5.642	5.903	-4,1%	-9,5%	4,4%
3	Korban MD (meninggal dunia)	591	678	571	567	12,8%	-18,7%	-0,7%
4	Korban LB (luka berat)	2.688	2.250	1.098	867	-19,5%	-105%	-27%
5	Korban LR (luka ringan)	4.290	4.487	4.964	5.724	4,4%	9,6%	13,3%
6	Jumlah Korban (3+4+5)	7.569	7.415	6.633	7.158	-2,1%	-11,8%	7,3%
7	Kerugian Materil	9.535	8.985	8.090	8.387	-6,1%	-11,1%	3,5%
8	Rupiah (Miliar)	18,5	21,9	16,7	14,2	15,5%	-31,1%	-18%

Sumber : Jurnal Ilmu Kepolisian Vol. 13 No. 3 Tahun 2018 (2023)

Gambar 1.2

Data Jumlah Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menurut Bulan Tahun 2019



Sumber : Website Portal Statistik Sektor Provinsi DKI Jakarta (2023)

Menurut data dari Jurnal Ilmu Kepolisian Vol.13 No.3 Tahun 2018, pada tahun 2018, jumlah penindakan lalu lintas tilang sebanyak 1.144.752.¹⁰ Pada data dari portal Statistik Sektoral Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2019, jumlah penindakan lalu lintas menurun menjadi 203.572.¹¹ Dengan dibentuknya elektronik tilang bisa menurunkan jumlah penindakan pelanggaran lalu lintas. Hal tersebut sudah dibuktikan dengan kedua data di atas.

Penerapan program Elektronik Tilang bisa mempermudah aparat dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dan menekan angka pelanggaran lalu lintas di Jakarta Timur. Program ini memberikan kemudahan bagi aparat dan para pelanggar dalam system administrasi untuk mengurus sanksi yang akan diberikan dan program ini bisa meningkatkan transparansi kepada masyarakat.

Dengan begitu, pelayanan publik yang diberikan pun bisa membantu pemerintah dalam mewujudkan *Elektronic Governance* di DKI Jakarta. Berdasarkan fenomena-fenomena diatas kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Kebijakan Program Peraturan Elektronik Tilang terhadap Penyelenggaraan Patuh Lalu Lintas di Jakarta Timur Sebagai Program Pendukung *Elektronic Governance* di DKI Jakarta”. Rentan pada penelitian ini menggunakan data dari tahun 2015 sampai 2022.

¹⁰ Agung Asmara, A Wahyurudhanto, dan Sutrisno pada tahun (2018) dalam bentuk jurnal dengan judul “*Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem E-Tilang*”. Diakses pada 21 Februari 2023 Pukul 9.53 WIB.

¹¹ *Ibid*

1.2 Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi program E-Tilang bisa menurunkan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah Jakarta Timur (studi kasus *Traffic Light Rawamangun Utara*) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah program Elektronik Tilang bisa meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas di wilayah Jakarta Timur studi kasus *Traffic Light Rawamangun Utara* sehingga bisa menyetelenggarakan patuh lalu lintas di wilayah tersebut.

1.4 Manfaat Penulisan

Pada penelitian ini memberikan beberapa manfaat yang bisa digolongkan menjadi dua bagian yaitu secara akademis dan secara praktis.

1. Manfaat Akademis berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada bidang ilmu administrasi publik tentang program-program pemerintah yang berbasis elektronik dan sebagai pengembangan bagi peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis berfungsi sebagai pengambilan keputusan bagi pemerintah untuk menambahkan fasilitas CCTV Elektronik Tilang atau E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) di wilayah Jakarta Timur.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan serta membagikan arah dan cerminan modul yang tercantum

dalam riset ini, penulis menyusun riset ini dengan sistematika yang terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian dan dibuat sebuah rumusan masalah penelitian untuk pembahasan penelitian yang dilakukan. Bab ini juga terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Sehingga, para pembaca bisa memahami pola pemikiran dari penulisan penelitian tersebut.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang kesamaan peneliti dengan penelitian sebelumnya dan mencantumkan berbagai teori-teori yang relevan sebagai pendukung penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan proses pengumpulan data dan informasi tentang penelitian yang dilakukan seperti waktu penelitian, tempat penelitian, teknik pengelolaan data, dan hasil penelitian. Sehingga, pada penelitian ini lebih terarah dan jelas perencanaannya mengenai tempat mana saja yang akan menjadi sumber informasi dan bagaimana mengelola data yang sudah didapatkan sehingga bisa menjadi suatu solusi atau jawaban atas permasalahan pada penelitian tersebut.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai permasalahan yang menjadi focus dalam penelitian dan hasil temuan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan mengenai Strategi Kebijakan Program Peraturan Elektronik Tilang terhadap Penyelenggaraan Patuh Lalu Lintas di Jakarta Timur (studi kasus TL Rawamangun Utara).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan secara singkat, jelas, dan mudah dimengerti bagi para pembaca.

Saran yang diberikan oleh peneliti berguna sebagai sumbangan peneliti pada bidang yang sudah diteliti.

